

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BALIKPAPAN

FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS

2023

Data Indikator Tahun 2022



DINAS PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KOTA BALIKPAPAN



SAMBUTAN WALI KOTA BALIKPAPAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan tahun 2023.

Saya menyambut baik dan menghargai kerja dari Tim Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kota Balikpapan yang mana tim ini melalui prosesnya bisa menyusun menghasilkan peta Ketahanan dan kerentanan Pangan yang bisa memberikan informasi tentang kondisi ketahanan dan kerentanan pangan sampai ke tingkat kelurahan dengan menggunakan 5 indikator dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang- Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan sistem peringatan terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi.

Peta ini merupakan gambaran makro tentang situasi ketahanan pangan di Kota Balikpapan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan program strategis oleh para pemangku kepentingan. Mengingat isu ketahanan pangan bersifat multi dimensi maka pembangunan ketahanan pangan harus dilakukan dalam satu koordinasi yang terarah, menyeluruh dan berkesinambungan.

Akhir kata, semoga Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat memberikan manfaat bagi upaya pembangunan di Kota Balikpapan, khususnya pembangunan ketahanan pangan.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela.

Kubangun dengan amal,

Kujaga dengan iman,

Kubela dengan doa.

Balikpapan, 11 Desember 2023

Wali Kota Balikpapan

H. Rahmad Mas'ud, S.E, M.E

**TIM
PENYUSUN**

Pengarah:
Ir. Sri Wahjuningsih

Pelaksana:
Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ketua)
Dicky Hariyono (Sekretaris)

Anggota:
Jumariyani
Joko Mujiono
Emmanuel Azhar
Annisa Amalia Suwito
Theodorus Dayutama
Devi Permanasari, SP
Abdul Wahab, SP
Ari Priswanto, S.Gz
Indri Setiawati
Widoyoko
Nurlaila, S.TP
Ratna Seri Dewi
Yuliana, SP
Diah Ernawati, SP
Diah Ayu Novitasari, S.Kom

Pembuat Peta:
Fauzi Ramadhani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pangan ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangatlah mutlak diperlukan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) disusun secara berjenjang. FSVA Nasional dengan lingkup analisis kabupaten/kota, disusun oleh Badan Pangan Nasional. FSVA Provinsi dengan lingkup analisis kecamatan, disusun oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. FSVA Kota Balikpapan dengan lingkup analisis kelurahan, disusun oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Penyusunan FSVA ini mengacu pada Panduan Penyusunan yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangan 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan (akses), dan pemanfaatan pangan khusus untuk daerah perkotaan.

Indikator ketersediaan pangan terdiri atas rasio jumlah sarana dan prasarana penyediaan pangan. Indikator akses pangan terdiri atas rasio jumlah penduduk tingkat kesejahteraan rendah dan akses jalan. Indikator aspek pemanfaatan pangan terdiri atas rasio jumlah penduduk terhadap penggunaan air bersih dan jumlah tenaga kesehatan.

Jenis data yang digunakan diolah bersumber dari tim penyusun yang dibentuk berdasarkan SK Walikota nomor 188.45-406/2023 tahun 2023 yang terdiri atas instansi vertikal dan OPD Pemerintah Kota Balikpapan.

Dari 34 kelurahan tidak terdapat kelurahan dengan Prioritas 1, terdapat 3 kelurahan Prioritas 2, 8 kelurahan Prioritas 3, 9 kelurahan Prioritas 4, 8 kelurahan Prioritas 5 dan 5 kelurahan Prioritas 6. Adapun kelurahan yang termasuk Rentan Pangan adalah Kelurahan Baru Ulu, Kariangau dan Teritip, sedangkan Kelurahan Marga Sari tergolong kelurahan sangat tahan pangan.

Dari hasil tersebut diharapkan memberikan informasi kepada perangkat daerah maupun instansi lainnya dalam hal penyediaan sarana pangan, peningkatan kesejahteraan penduduk, air bersih dan tenaga Kesehatan untuk memberikan perhatian dan fokus kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut di kelurahan Rentan Pangan.

Demikian ringkasan dari laporan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan ini sebagai informasi dalam pelaksanaan rekomendasi pengambilan kebijakan pembangunan pangan dan gizi.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALI KOTA BALIKPAPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTARGAMBAR	viii
DAFTAR PETA.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI	2
1.3 METODOLOGI	5
BAB II KETERSEDIAAN PANGAN	10
2.1 SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN	10
2.3 STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN	12
BAB III AKSES TERHADAP PANGAN	13
3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH.....	13
3.2 AKSES TRANSPORTASI	16
3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN	16
BAB IV PEMANFAATAN PANGAN	17
4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH.....	17
4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN.....	19
4.3 STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN	21
BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	22
5.1 KONDISI KETAHANAN PANGAN	22
5.2 FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN.....	25
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	26
6.1 KESIMPULAN	26
6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator FSVA Kota 2022	6
Tabel 2. Bobot Indikator Individu	8
Tabel 3. Keterangan dan Pola Warna FSVA	9
Tabel 4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas	10
Tabel 5. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Balikpapan	13
Tabel 6. Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas.....	13
Tabel 7. Sebaran Kelurahan berdasarkan Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih berdasarkan Skala Prioritas	17
Tabel 8. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan berdasarkan Skala Prioritas	19
Tabel 9. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas.....	22
Tabel 10. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 2	24
Tabel 11. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 3	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
Gambar 2. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Ketersediaan Sarana Penyedia Pangan	11
Gambar 3. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah.....	14
Gambar 4. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Akses terhadap Air Bersih.....	18
Gambar 5. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Rasio Tenaga Kesehatan	20
Gambar 6. Prosentase Kelurahan berdasarkan Analisis Komposit (Gabungan Indikator)	23

DAFTAR PETA

Peta 1. Peta Kelurahan dengan Indikator Sarana Penyedia Pangan.....	11
Peta 2. Peta Kelurahan dengan Indikator Kesejahteraan Penduduk	15
Peta 3. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Jalan	16
Peta 4. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Air Bersih.....	18
Peta 5. Peta Kelurahan dengan Indikator Tenaga Kesehatan.....	20
Peta 6. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) kelurahan dengan total penduduk semester II tahun 2022 sebesar 727.665 jiwa (sumber : Disdukcapil Balikpapan). Secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 116°5' - 117°0' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 1°0' - 1°5' Lintang Utara/Selatan. Kota Balikpapan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki wilayah seluas 51.451 ha (BPK, 2022).

Kota Balikpapan, memiliki iklim tropis dengan hujan sepanjang tahun, Suhu udara tertinggi sepanjang tahun 2022 tercatat pada bulan April sebesar 33,4 derajat celsius dan terendah pada bulan Februari sebesar 22 derajat celsius, Adapun secara rata-rata, suhu udara tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Mei dengan 27,8 derajat celsius dan terendah pada bulan Januari, Februari dan September dengan 26,8 derajat celsius, Curah hujan tertinggi pada tahun 2022 tercatat pada bulan Agustus dengan 552,0 mm dan terendah pada bulan Mei dengan 109 mm, Adapun hari hujan tertinggi yang tercatat pada tahun 2022 terjadi pada bulan Oktober dengan 22 hh (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 127.325,67 miliar, secara nominal meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dilihat berdasarkan distribusinya, kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kepada PDRB Kota Balikpapan, yakni sebesar 47,20 persen; atau hampir separuh dari total keseluruhan PDRB Kota Balikpapan tahun 2022. Di urutan kedua adalah kategori Konstruksi, yang memberikan kontribusi 15,81 persen. Kemudian di urutan ketiga adalah kategori Transportasi dan Pergudangan dengan 10,75 persen (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

Sementara itu, PDRB Kota Balikpapan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 91.104,44 miliar, meningkat pula bila dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka PDRB harga konstan ini dapat diturunkan menjadi laju pertumbuhan Kota Balikpapan, yang pada periode 2021-2022 mengalami kontraksi sebesar 4,94 persen. Bila dirinci per kategori, kategori Transportasi dan Pergudangan menunjukkan laju pertumbuhan tertinggi sepanjang 2021-2022 dengan capaian 15,91 persen (Kota Balikpapan dalam angka, 2023).

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kota dengan analisis sampai tingkat kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA Kota ini mulai disusun tahun 2021. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kota pada tahun 2023.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA Kota merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2 KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang di definisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi di samping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah *United Nations* (PBB) yang pada tahun

2013 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan *higiene* yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.



2.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi
 Gambar 1. Kerangka Konseptual Ketahanan Pangan dan Gizi

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk di dalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan

kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak **gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan

lain lain.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3 METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun Kota, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat Kota. Pemilihan indikator FSVA Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota terdiri dari 5 (lima) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1. Indikator FSVA Kota 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga di kelurahan	DPOP, DPMPTSP, Disdag
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (jumlah penerima PKH) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Dinas Sosial, 2022
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	DPUPR, BPS, Keputusan Tim Penyusun FSVA
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	DPUPR
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Dinas Kesehatan, 2022

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- . Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- a. Menghitung skor komposit Kota/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:
$$Y_j = \sum_{i=1}^5 a_i X_{ij} \quad (1)$$

Dimana

:

Y_j : Skor komposit Kota/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada Kota/kota ke-j

i : Indikator ke-1,2, ...5

j : Kelurahan ke 1, 2, ... 34

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

- b. Mengelompokkan kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K^0 = \sum_{i=1}^5 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana

:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

i : indikator ke 1, 2, 3, ...5

j : komposit ke 1, 2, 3, ... 6

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok prioritas 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok prioritas 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian

juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

Tabel 3. Keterangan dan Pola Warna FSVA

No	Uraian	Makna	Pola Warna Peta (RGB)	Kode Warna
1	Prioritas 1	Sangat Rentan	R:110, G:31, B: 31	#6e1f1f
2	Prioritas 2	Rentan	R:232, G: 89, B: 97	#e85961
3	Prioritas 3	Agak Rentan	R:244, G: 161, B: 167	#f4a1a7
4	Prioritas 4	Agak Tahan	R: 201, G: 224, B: 119	#c9e077
5	Prioritas 5	Tahan	R: 148, G: 201, B: 69	#94c945
6	Prioritas 6	Sangat Tahan	R: 59, G: 112, B: 59	#3b703b

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1 SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

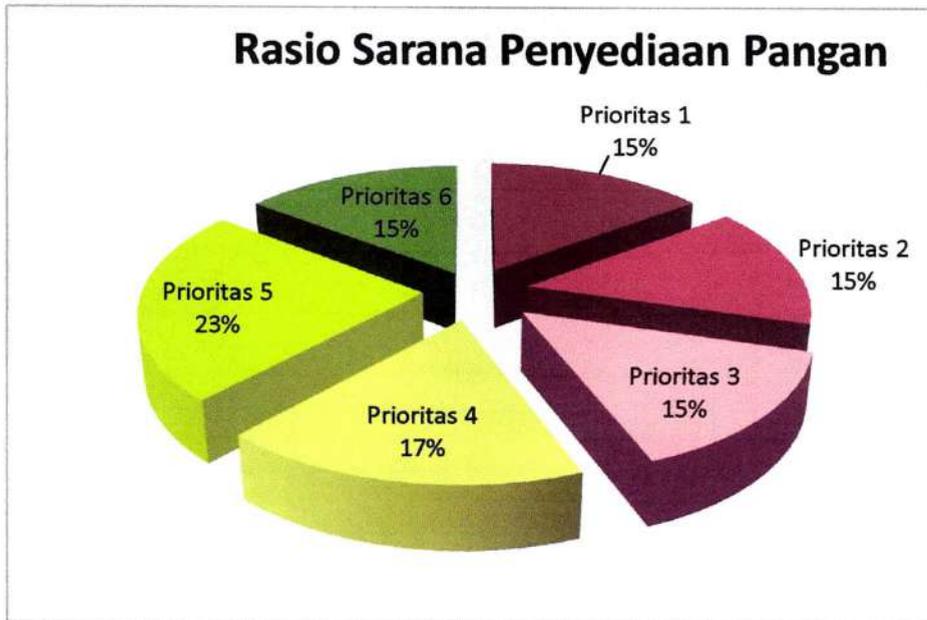
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, kelompok pertokoan, hotel, penginapan) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan ini merupakan bobot indikator terbesar dalam perhitungan FSVA.

Tabel 4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Penyedia Pangan berdasarkan Prioritas

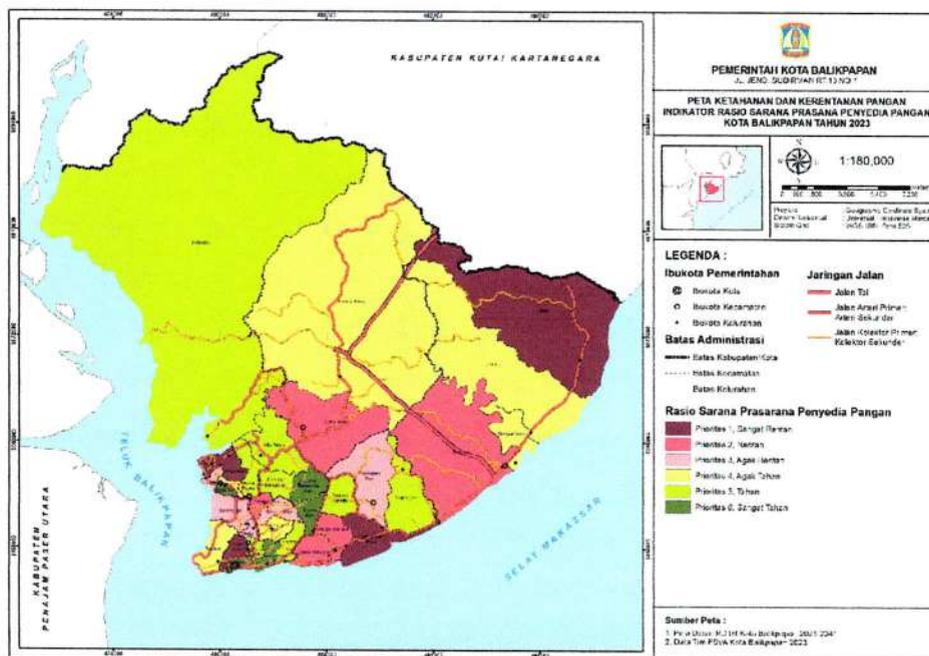
No.	Prioritas	Rasio Sarana Penyedia Pangan	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	Prioritas 1	$\leq 0,0366$	5	14.7
2	Prioritas 2	$> 0,0366$	5	14.7
3	Prioritas 3	$> 0,0084$	5	14.7
4	Prioritas 4	$> 0,0104$	6	17.6
5	Prioritas 5	$> 0,0119$	8	23.5
6	Prioritas 6	$> 0,0151$	5	14.7

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.

Dari 34 Kelurahan di Kota Balikpapan, 5 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (14,7%), 5 kelurahan prioritas 2 (14,7%) dan 5 kelurahan prioritas 3 (20,6%).



Gambar 2. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Ketersediaan Sarana Penyedia Pangan



Peta 1. Peta Kelurahan dengan Indikator Sarana Penyedia Pangan

2.2 STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan dari tahun 2020 ke 2021 mencapai 1,35 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.381 jiwa per km² (Disdukcapil, 2022). Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 44,11%. Jumlah ini mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya perbaikan data cut off dari data yang kami peroleh untuk dimutakhirkan pada penyusunan FSVA tahun 2023. Selain itu juga hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan Pangan melalui kemudahan dalam izin berusaha maupun pembangunan pasar dan pertokoan.
2. Membuka rencana tata ruang untuk pembangunan pertokoan dan pasar.
3. Optimalisasi penggunaan lahan Pekarangan di lingkungan.
4. Pelaksanaan Gelar pasar murah untuk memudahkan penyediaan sarana prasarana pangan.
5. Pengembangan potensi komoditas unggulan seperti buah naga, papaya mini Balikpapan, Salak, Kelapa.
6. Penetapan Kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dalam revisi RTRW sebagai fokus pemerintah Kota dalam mengatur dan memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan lahan pangan berkelanjutan khususnya di Balikpapan Timur.
7. Peningkatan Peran BUMD di Kota Balikpapan dalam penyediaan sarana pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
8. Komitmen penyediaan pangan melalui kerjasama antar daerah melalui BUMD serta BUMN dan peran distributor
9. Melakukan monitoring dan pengawasan kepada Distributor dan pemasok pangan di Kota Balikpapan
10. Peningkatan kegiatan penganeekaragaman pangan (pelatihan pembuatan produk pangan berbasis bahan lokal).
11. Mendorong pembangunan infrastruktur pergudangan maupun sarana penyimpanan pangan di Kota Balikpapan
12. Mendorong partisipasi penyediaan pangan mandiri masyarakat melalui *urban farming*.
13. Pendirian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

BAB III

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kota, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Kota Balikpapan. Persentase kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Balikpapan terus mengalami penurunan dari 2,82% (17.550 jiwa) tahun 2016 menjadi 2,45% tahun 2022 (BPS, 2022). Dalam 6 tahun terakhir persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 sebesar 2,89%. Dalam Profil Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2022, Kota Balikpapan menduduki angka kemiskinan terkecil di Kalimantan Timur, sedangkan pada level Nasional menduduki posisi ke-2 terkecil setelah Kota Sawah Lunto (2,28%).

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin di Kota Balikpapan

Keterangan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penduduk miskin (%)	2,82	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45

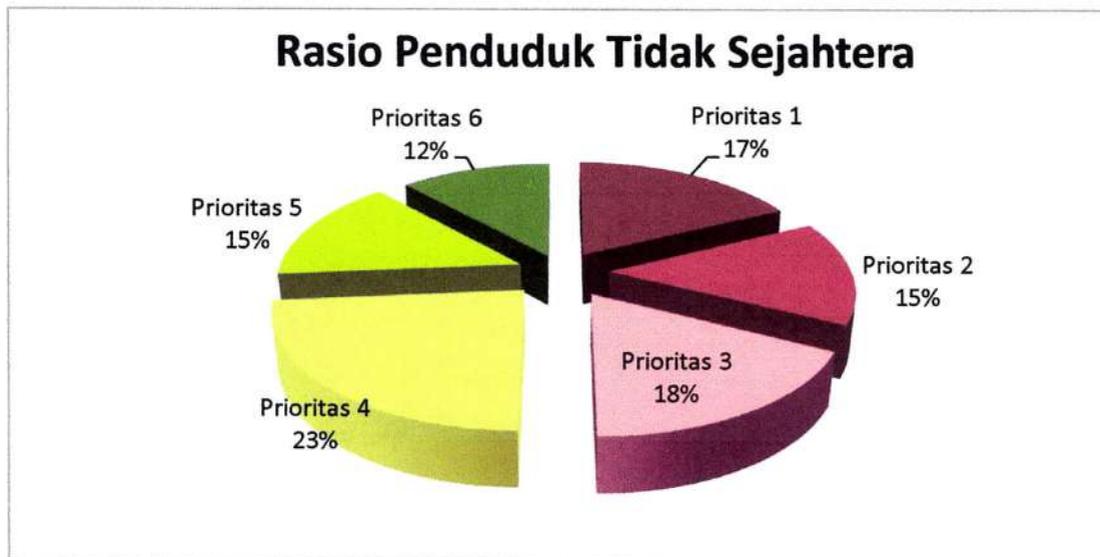
Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2022 dan Profil Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2022.

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2022 (**Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2022**), ada 6 kelurahan di Kota Balikpapan berada pada kategori prioritas 1. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Balikpapan ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan.

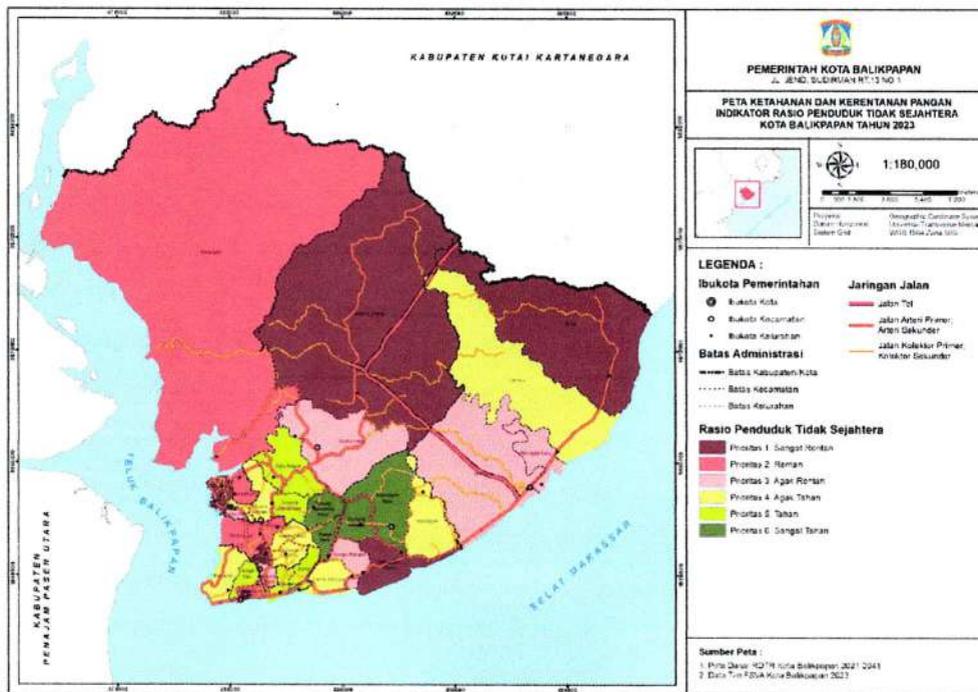
Tabel 6. Sebaran Kelurahan dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0.0137 ke atas	6	17,6
2	0,0099 - 0,00137	5	14,7
3	0,0079 - 0,0099	6	17,6
4	0,0060 - 0,0079	8	23,5
5	0,0037 - 0,0060	5	14,7
6	< 0,00037	4	11,8

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.



Gambar 3. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah



Peta 2. Peta Kelurahan dengan Indikator Kesejahteraan Penduduk

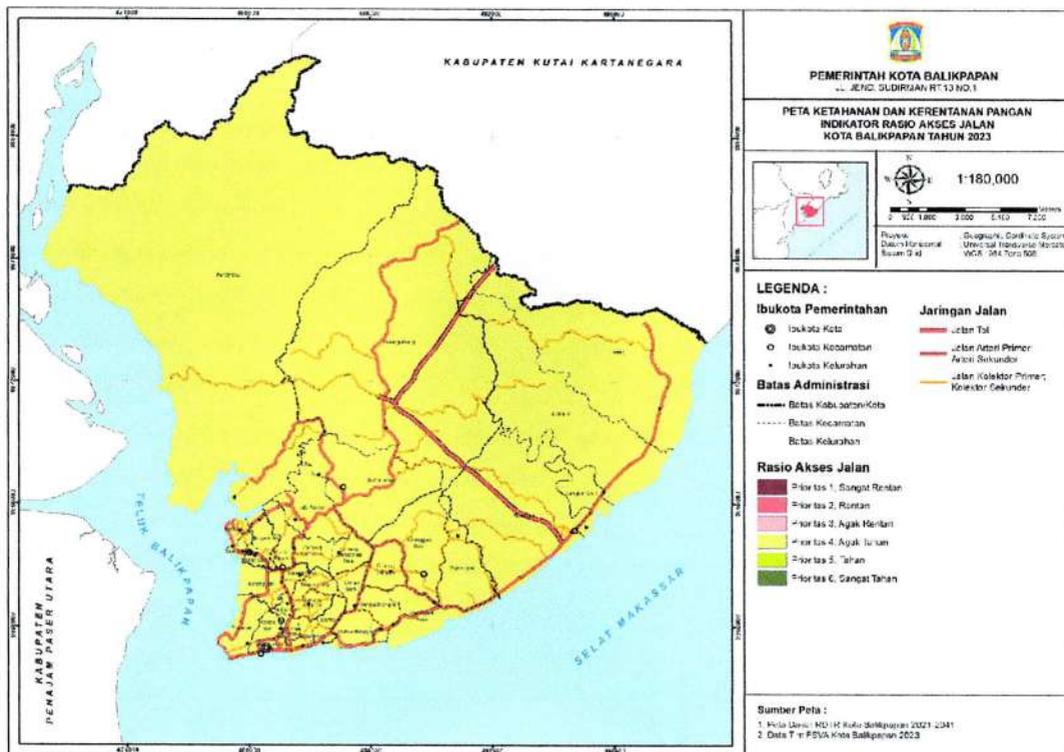
Strategi penurunan tingkat Penduduk dengan kesejahteraan terendah sebagai berikut:

1. Adanya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga penerima manfaat (KPM) Program PKH melalui Ketahanan finansial dan bantuan sembako.
2. Stabilisasi harga pangan dan menjaga kemampuan daya beli masyarakat.
3. Fasilitasi pertumbuhan lapangan usaha mandiri bagi penduduk kategori kesejahteraan rendah melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4. Peningkatan peluang kerja bagi penduduk KTP Balikpapan
5. Adanya penyaluran Cadangan pangan pemerintah pusat melalui Bulog dalam bantuan pangan
6. Adanya bantuan jaminan BPJS kesehatan Kelas III
7. Pengalokasian dana Bosda dari APBD untuk peserta didik warga Kota Balikpapan
8. Penyediaan peluang kerja program padat karya untuk wilayah Kota Balikpapan.
9. Program bedah rumah untuk masyarakat miskin
10. Pemberian beasiswa untuk masyarakat miskin dan subsidi SPP sekolah swasta
11. Meningkatkan peran PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan masyarakat setempat melalui kader PKK dan Posyandu.
12. Mendorong stabilisasi harga pangan pokok melalui pelaksanaan pasar murah bahan pokok.
13. Pelatihan tenaga kerja melalui BLK untuk mengisi peluang kerja di wilayah Kota Balikpapan.

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota

Balikpapan, semua kelurahan memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kota Balikpapan.



Peta 3. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Jalan

3.3 STRATEGI PENINGKATAN AKSES PANGAN

Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun 2021-2026 di antaranya:

- Mendorong kemandirian pangan masyarakat melalui urban farming
- mengembangkan sentra industri dan produk ekonomi lokal
- Keterpaduan program untuk peningkatan keterampilan dan perluasan akses modal serta memperluas perlindungan dan jaminan sosial.
- Memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan kewirausahaan

BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

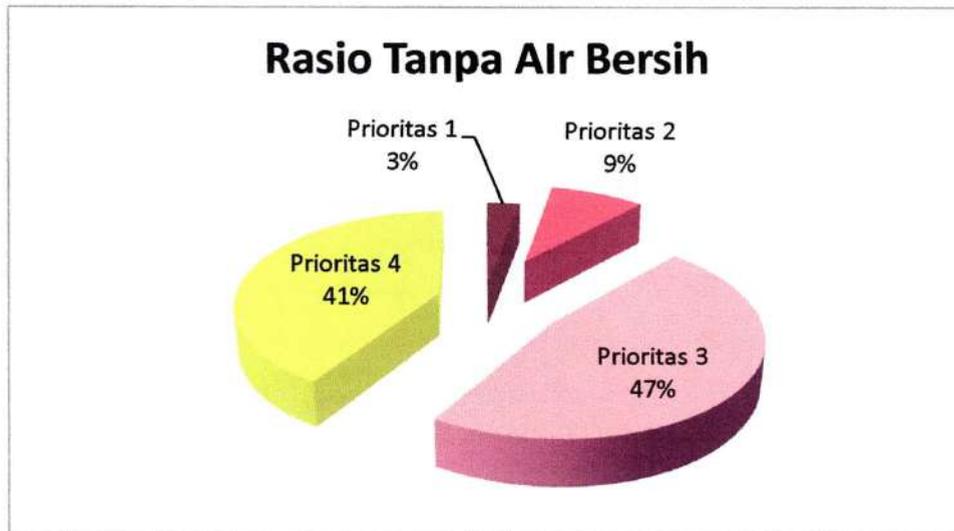
4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu. Dari table 7 dan hasil pemetaan memberikan informasi seluruh kelurahan di Kota Balikpapan masih terapat rumah tangga menggunakan sumber air bersih tidak terlindungi untuk keperluan sehari-hari. Tidak adanya prioritas 5 dan prioritas 6 ini karena range perbandingannya dengan jumlah rumah tangga 0.

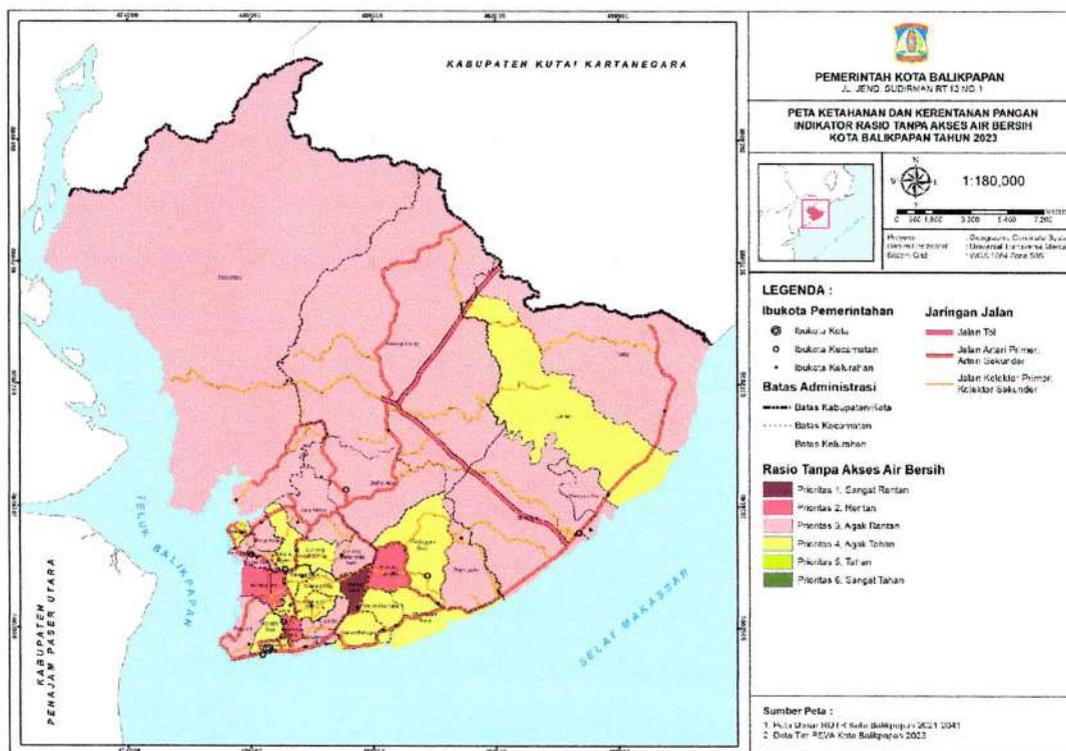
Tabel 7. Sebaran Kelurahan berdasarkan Rumah Tangga tanpa Akses Air Bersih berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	0,0254 ke atas	1	14.71
2	0,0142 - 0,0254	3	17.65
3	0,0034 - 0,0142	16	44.12
4	0,0000 - 0,0034	14	23.53
5	0,0000 - 0,0000		-
6	< 0,0000		0

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.



Gambar 4. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Akses terhadap Air Bersih



Peta 4. Peta Kelurahan dengan Indikator Akses Air Bersih

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

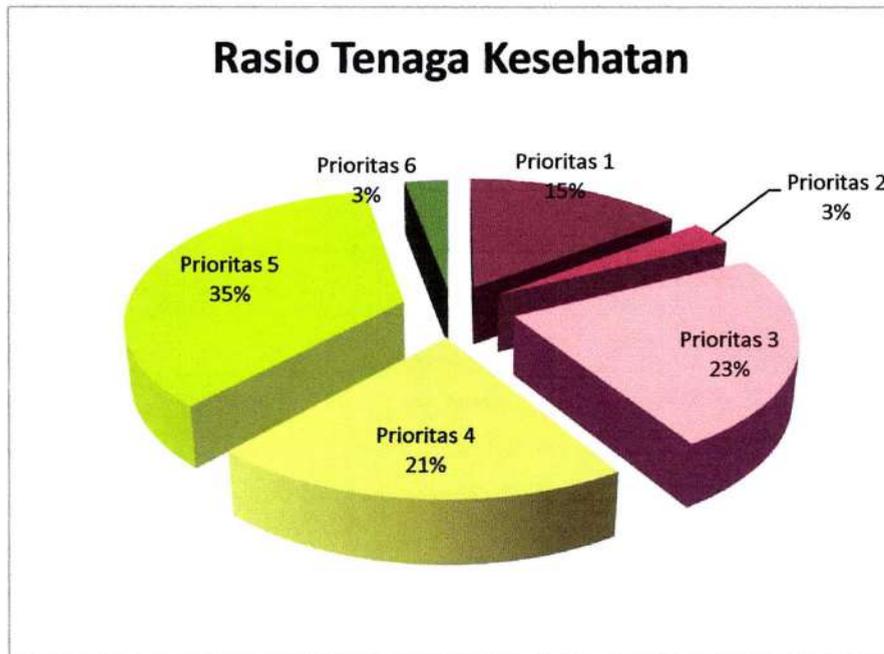
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; (4) Tenaga kesehatan lainnya (Perawat, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Apoteker, Asisten Apoteker, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Keterampilan Fisik, Keteknisian Medis, Teknik Biomedik) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk merupakan jumlah tenaga kesehatan yang terdaftar dalam seluruh fasilitas kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan yang melayani di beberapa fasilitas kesehatan lainnya. Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat. Dari sebaran rasio tenaga kesehatan dapat kita ketahui ada sekitar 41 % kelurahan yang ada di Kota Balikpapan berada pada prioritas 1-3. Sedangkan kelurahan dengan prioritas 1 berada pada kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip, Kariangau, dan Karang Joang. Pada kelurahan ini memiliki jumlah penduduk yang besar dengan luasan wilayah yang cukup luas

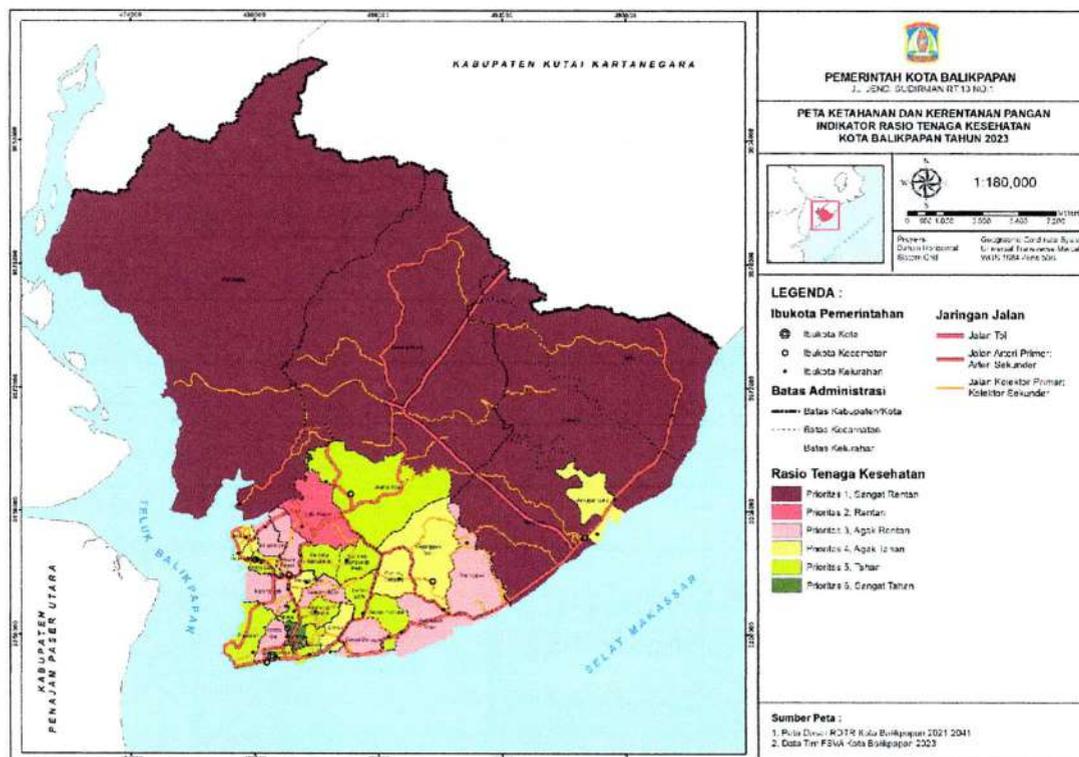
Tabel 8. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	1,1012 ke atas	5	14,7
2	0,1557 - 1.1012	1	2,9
3	0,0455 - 0,1557	8	23,5
4	0,0248 - 0,0455	7	20,6
5	0,0031 - 0,0248	12	35,3
6	< 0,0031	1	2,94

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.



Gambar 5. Prosentase Kelurahan dengan Indikator Rasio Tenaga Kesehatan



Peta 5. Peta Kelurahan dengan Indikator Tenaga Kesehatan

4.3 STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

a. Strategi Peningkatan Akses Air Bersih

- Pemanfaatan waduk Teritip dengan pembangunan jalur pipa distribusi di Kelurahan Teritip
- Penambahan jalur distribusi Perumda Tirta Manuntung untuk pelanggan wilayah Kota Balikpapan yang belum terlayani
- Pembangunan sarana air bersih sumur dalam untuk daerah yang sukar dijangkau dalam distribusi Perumda Tirta Manuntung
- Menjalinkan Kerjasama dalam rangka Pembangunan SPAM Regional (air dari sungai mahakam dialirkan ke bppn) Sepaku Semoi - Balikpapan
- Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan pada Kantor-Kantor Instansi Pemerintah, sekolah dan rumah tinggal dalam rangka Pemanenan air hujan (PAH)/rain water harvesting (RWH)
- Pengolahan Air Laut menjadi Air Bersih Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) / Desalinasi ———» diutamakan utk sektor industri
- Percepatan Pembebasan Embung Aji Raden dan Pembangunan Embung Aji Raden di Kelurahan Lamaru
- Peningkatan pengawasan kualitas air bersih
- Kerjasama penyediaan air baku dengan kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara
- Hibah air minum perkotaan sebanyak 500 sambungan

b. Strategi Peningkatan Tenaga Kesehatan

- Penambahan tenaga kesehatan Kota Balikpapan.
- Penambahan fasilitas kesehatan Kota Balikpapan.
- Penambahan fasilitas sarana Kesehatan Masyarakat di Kota Balikpapan khususnya di Kecamatan Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara.
- informasi dari bidang terkait SDK di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- melalui penugasan khusus dari Kemenkes seperti Program Internsip Dokter. Indonesia, Program Internsip Dokter Gigi Indonesia dan Pendaya Gunaan Dokter Spesialis bagi RS melalui kerjasam dengan perguruan tinggi.
- Membuat usulan penambahan pegawai ke BKPSDM melalui jalur PWK (Pindah Wilayah Kerja) dari daerah lain.
- Membuka formasi dan usulan ke Pemkot terkait penerimaan CPNS / PPPK.

BAB V

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan sesuai pada table 2.

5.1 KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kelurahan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 34 kelurahan yang ada di Kota Balikpapan maka didapatkan 0 kelurahan (Prioritas 1), 3 kelurahan (Prioritas 2), 8 kelurahan (Prioritas 3), 9 kelurahan (Prioritas 4), 9 kelurahan (Prioritas 5) dan 5 kelurahan (Prioritas 6).

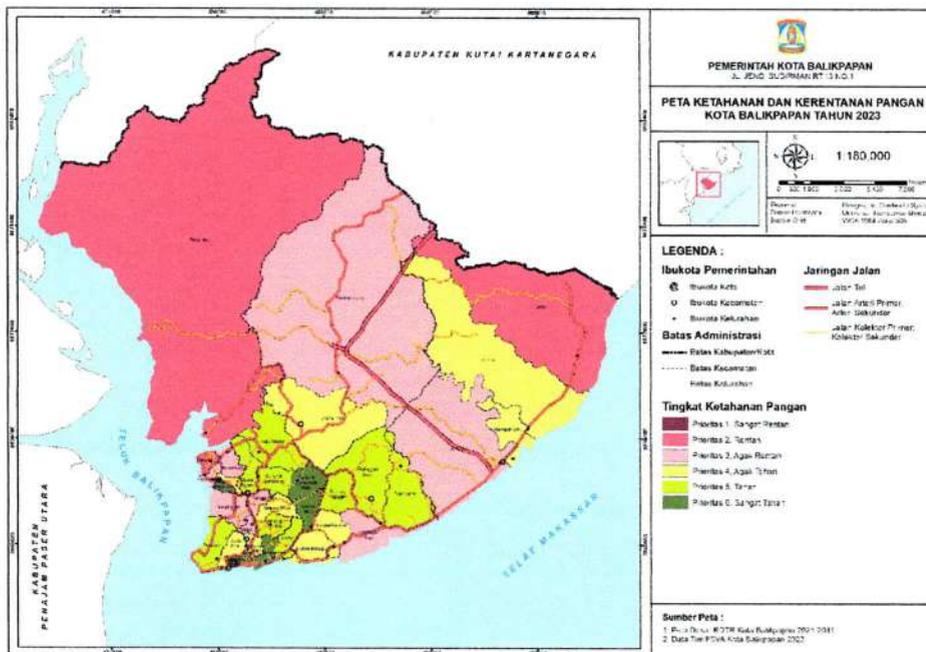
Tabel 9. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	0	0%
2	3	8,8%
3	8	23,5%
4	9	26,5%
5	9	26,5%
6	5	14.7%

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.



Gambar 6. Prosentase Kelurahan berdasarkan Analisis Komposit (Gabungan Indikator)



Peta 6. Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Tidak terdapat kelurahan rentan pangan prioritas 1 di Kota Balikpapan pada tahun 2022. Kelurahan prioritas 2 tersebar di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (2 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Tengah (1 kelurahan), Kecamatan Utara (1 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Timur (1 kelurahan) sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 10. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 2

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit
1	Balikpapan Timur	Teritip	43,34
2	Balikpapan Barat	Baru Ulu	50,80
3	Balikpapan Utara	Kariangau	51,37

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.

Kelurahan prioritas 3 tersebar di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (2 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Tengah (3 kelurahan), Kecamatan Utara (1 kelurahan), Kecamatan Balikpapan Timur (1 kelurahan), Kecamatan dan Kecamatan Balikpapan Selatan (1 Kelurahan) sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 11. Daftar Kelurahan Rentan Pangan Prioritas 3

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Komposit
1	Balikpapan Barat	Baru Tengah	56,30
		Margo Mulyo	57,16
2	Balikpapan Tengah	Karang Rejo	60,36
		Mekar Sari	58,19
		Karang Jati	59,45
3	Balikpapan Utara	Karang Joang	53,80
4	Balikpapan Timur	Manggar	58,89
5	Balikpapan Selatan	Sepinggan Raya	55,92

Sumber: FSVA Kota Balikpapan 2023, Diolah.

5.2 FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Berdasarkan analisis komposit, penyumbang terbesar kerawanan pangan terdapat pada rasio sarana dan prasarana penyedia pangan dan rasio penduduk tidak sejahtera. Hal ini kemungkinan terjadi adanya pemutakhiran pada data tarikan KBLI. Adanya perubahan cut off pada rasio sarana dan prasarana penyedia pangan ikut andil mempengaruhi data rasio pada indikator ini. Dibandingkan tahun 2022 ada kenaikan rasio dari sarana penyediaan pangan dan penduduk tidak sejahtera. Di tahun 2022 jumlah rasio penduduk tidak sejahtera berada di prioritas 1 serta masih banyaknya sarana prasarana penyediaan pangan yang mengalami perubahan prioritas seiring dengan adanya perbaikan cut off pada data versi 3 (2021). Penyebab kerentanan pangan juga dipengaruhi oleh Tingkat perekonomian Kota Balikpapan yang memacu timbulnya sarana penyediaan pangan serta stagnannya geliat penambahan sarana prasarana Kesehatan.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) tingginya rasio penduduk tidak sejahtera, (2) rasio penduduk pertenaga kesehatan dan (3) rendahnya rasio sarana prasarana penyedia pangan terhadap jumlah penduduk.

Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan:

- a. Pemerintah Kota dapat memfokuskan kegiatan pembangunan di wilayah prioritas 2 dan 3 terutama pada sektor fasilitas sarana penyediaan pangan seperti pasar maupun supermarket.
- b. Pemberian insentif bagi pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah rentan pangan Prioritas 2 dan 3.
- c. Membuat evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi serta dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
- d. Alternatif sumber air baku bagi Masyarakat yang belum terlayani Perusahaan umum daerah Tirta Manuntung Balikpapan

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1 KESIMPULAN

Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan tahun 2023 menggunakan data indikator tahun 2022. Setelah dilakukan analisis melalui lima indikator secara individu, maka dapat memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator ketersediaan sarana penyedia pangan terdapat 5 kelurahan yang masuk prioritas 1 (sangat rentan) yaitu Kelurahan Teritip, Baru Ulu, Margomulyo, Telaga Sari dan Sepinggian Raya. Selain itu terdapat 5 kelurahan yang masuk prioritas 2 (Agak rentan) yaitu Kelurahan Manggar, Graha Indah, Karang rejo, Sungai angka dan damai bahagia. Terdapat 5 kelurahan yang masuk prioritas 3 (rentan) yaitu Baru tengah, Mekar sari, Karang jati, Sumber Rejo dan Sepinggian Baru.
- b. Indikator penduduk tidak sejahtera (Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan) pada indikator ini 6 kelurahan masuk prioritas 1 yaitu Kelurahan Teritip, Baru Tengah, Baru Ulu, Karang Joang, Mekar Sari dan Sepinggian Raya. Pada Prioritas 2 terdapat 5 kelurahan yaitu Kelurahan Kariangau, Margomulyo, Karang Rejo, Karang Jati dan Klandasan Ulu.
- c. Indikator Akses Jalan, semua kelurahan sudah masuk kategori 4 yaitu semua jalan sudah dapat dilalui sepanjang tahun.
- d. Pada Indikator akses air bersih terdapat 1 kelurahan yang masuk prioritas 1 yaitu Kelurahan Damai Baru ada peningkatan jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih di kelurahan ini, untuk prioritas 2 terdapat 3 kelurahan yaitu kelurahan Gunung sari ilir, Karang Jati dan Gunung Bahagia sedangkan pada prioritas 3 terdapat 16 Kelurahan yaitu Manggar, Teritip, Manggar Baru, Baru ilir, Baru tengah, Kariangau, Margomulyo, Marga sari, Batu ampar, Karang Joang, Gunung Samarinda Baru, Graha Indah, Sepinggian, Prapatan, Klandasan ilir dan Damai. Pada perhitungan indikator akses air bersih ini ada perubahan pengambilan sumber data yang di tahun sebelumnya menggunakan data podes serta menko PMK saat ini dikumpulkan melalui Dinas Pekerjaan Umum.
- e. Indikator tenaga kesehatan terdapat 4 kelurahan yang masuk prioritas 1 yaitu Kelurahan Manggar, Lamaru, Teritip, Kariangau dan Karang Joang. Selain itu terdapat 1 kelurahan yang masuk prioritas 2 yaitu Kelurahan Batu ampar dan terdapat 8 kelurahan yang masuk prioritas 3 yaitu Kelurahan Margo Mulyo, Muara Rapak, Karang Jati, Sumber rejo, Sepinggian, Sepinggian raya, Damai Bahagia dan Telaga Sari.

Selanjutnya setelah dilakukan analisis komposit (gabungan indikator), maka memperoleh hasil kesimpulan berikut:

- a. Kelurahan dengan peringkat 1, 2 dan 3 teratas adalah Marga sari, Gunung samarinda Baru dan Damai bahagia Ketiga kelurahan tersebut memiliki prioritas 6 (sangat tahan pangan) dari data table FSVA dapat menggambarkan sarana penyediaaan pangan di wilayah tersebut cukup banyak sangat sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, rasio tenaga kesehatan yang cukup mumpuni di wilayah tersebut terlihat banyaknya fasilitas

- kesehatan di wilayah tersebut.
- b. Kelurahan dengan peringkat 32, 33 dan 34 terbawah adalah Kariangau, Baru Ulu dan Teritip. Ketiga kelurahan tersebut memiliki prioritas 1 (sangat rentan) dan 2 (rentan) pada Rasio Akses Air Bersih dan prioritas 1 (sangat rentan) pada Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan dan Rasio Penduduk Tidak Sejahtera. Pada ketiga kelurahan tersebut belum semua wilayah terlayani air bersih sehingga masih terdapatnya rumah tangga tanpa air bersih, belum tercukupinya toko-toko, pasar dan swalayan sebagai sarana penyedia pangan dan serta meningkatnya jumlah kemiskinan.
 - c. Tidak terdapat kelurahan di Kota Balikpapan indikasi Prioritas 1 (Sangat rentan) namun Prioritas 2 (Agak rentan) terdapat 3 (Tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Teritip, Baru ulu, dan Kariangau dan Prioritas 3 (rentan) terdapat 13 (tiga belas) kelurahan yaitu Kelurahan Sepinggian Raya, Telaga Sari, Manggar, Manggar Ba ru, Lamaru, Muara Rapak, Graha Indah, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu, Mekar Sari, Baru Ilir, dan Margo Mulyo. Hal ini menunjukkan kelurahan yang tidak mengalami perubahan indikasi rentan pangan adalah kelurahan Teritip dan meningkatnya kerentanan pangan pada kelurahan Baru Ulu dan Karang Joang
 - d. Prioritas 4 (Agak tahan pangan), terdapat 12 kelurahan yaitu Kelurahan Manggar Baru, Baru ilir dan Graha Indah.
 - e. Prioritas 5 (Tahan pangan), terdapat 4 kelurahan yaitu Batu ampar, Sepinggian, Prapatan dan damai.
 - f. Prioritas 6 (Sangat tahan pangan), terdapat 3 Kelurahan yaitu Marga sari, Gunung samarinda Baru dan Klandasan ilir.

6.2 REKOMENDASI KEBIJAKAN

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan di Kota Balikpapan diarahkan pada kegiatan:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyediaan Pangan melalui kemudahan dalam izin berusaha maupun pembangunan pasar dan pertokoan;
2. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber penyediaan pangan;
3. Sosialisasi Penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
4. Mendorong peluang kerja dengan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
5. Mendorong peran BUMD bidang pangan dalam menyediakan sarana dan prasarana pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
6. Pelaksanaan gerakan pasar murah (GPM) di wilayah rentan rawan pangan;
7. Mendorong Duplikasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
8. Melanjutkan program bantuan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin BPJS kelas III
9. Pengalokasian dana Bosda dari APBD dan Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.
10. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan perekonomian wilayah;

11. Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, irigasi);
12. Penambahan cakupan layanan air bersih oleh Perumda Tirta Manggar dan penambahan fasilitas air bersih ;
13. Peningkatan fasilitas sarana kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan terutama di Kecamatan Balikpapan timur dan Utara
14. Menjalinkan kerjasama antar daerah kutai kartanegara dan Penajam paser utara (PPU) dalam memenuhi kebutuhan air baku..
15. Meningkatkan peran PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2022, November 25). *Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021*. Diambil kembali dari JDIH BPK RI: <https://peraturan.bpk.go.id/>
- BPS. (2023). *Balikpapan dalam angka 2023* Balikpapan: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan.



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-406/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif, perlu disusun peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*);
- b. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

MEMUTUSKAN:

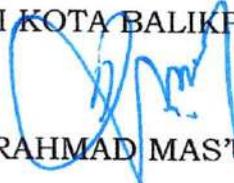
- Menetapkan :
- KESATU** : Tim penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- I. Pengarah:
memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
 - II. Pelaksana:
 1. Ketua:
 - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan peta ketahanan pangan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
 2. Sekretaris:
membantu Ketua dalam pelaksanaan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan.
 3. Anggota:
 - a. melakukan koordinasi, pengumpulan validasi dan verifikasi data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
 - c. mengolah dan menganalisis data indikator ketahanan dan kerentanan pangan;
 - d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
 - e. memproses penetapan hasil penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan;
 - f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan melalui media elektronik dan non elektronik;
 - g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi serta pendampingan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
 - h. meningkatkan sinergi program dan/atau kegiatan untuk penanganan daerah rentan rawan pangan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-406/2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN
KERENTANAN PANGAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN
DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	PERANGKAT DAERAH
I.	Pengarah	1. Kepala DP3 Kota Balikpapan	DP3 Kota Balikpapan
		2. Sekretaris DP3 Kota Balikpapan	DP3 Kota Balikpapan
II.	a. Ketua	Kabid Ketahanan Pangan DP3 Kota Balikpapan	DP3 Kota Balikpapan
	b. Sekretaris	Dicky Hariyono	DP3 Kota Balikpapan
	c. Anggota	1. Jumariyani	DP3 Kota Balikpapan
		2. Joko Mujiono	Dinsos Kota Balikpapan
		3. Emmanuel Azhar	Bappeda Litbang Kota Balikpapan
		4. Devi Permanasari	Disdag Kota Balikpapan Kota Balikpapan
		5. Ari Priswanto	Dinkes Kota Balikpapan
		6. Indri Setiawati	DPU Kota Balikpapan Kota Balikpapan
		7. Abdul Wahab	Bagian Perekonomian Setda Kota Balikpapan
		8. Theodorus dayutama	DPOP Kota Balikpapan
		9. Widoyoko	Disdukcapil Kota Balikpapan
		10. Nurlaila	DP3 Kota Balikpapan
		11. Ratna Seri Dewi	DPMPTSP Kota Balikpapan
		12. Vony Lestari	DPMPTSP Kota Balikpapan
		13. Yuliana	DP3 Kota Balikpapan
		14. Annisa Amalia	DP3 Kota Balikpapan
15. Diah Ernawati	DP3 Kota Balikpapan		
16. Diah Ayu Novitasari	DP3 Kota Balikpapan		

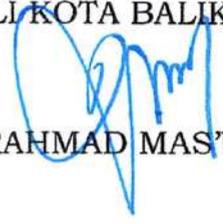
WALI KOTA BALIKPAPAN,


RAHMAD MAS'UD

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DP3 Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DOKUMENTASI



Rapat FSVA 12 Oktober 2023 di ruang Kepala Dinas



Rapat FSVA 24 November 2023 di ruang Kepala Dinas



Rapat FSVA 5 Desember 2023 di ruang Kepala Dinas

VALIDASI DATA INDIKATOR KETERSEDIAAN

Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA-Desa) 2023

Kota :

No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Sumber		Data tahun 2022		Data setelah verifikasi		sebelum verifikasi		Validasi	KESEPAKATAN
					Tahun		2022		2022		2022			
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		
					2. Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan	2. Data yang Dipakai di FSVA (Unit)								
1	Balikkpapan Timur	6471011	6471011001	Kelurahan Manggar	627	129	40	129	40	129	129	129		
2	Balikkpapan Timur	6471011	6471011002	Kelurahan Lamaru	105	51	5	51	5	51	51	51		
3	Balikkpapan Timur	6471011	6471011003	Kelurahan Teritip	136	37	3	37	3	37	37	37		
4	Balikkpapan Timur	6471011	6471011004	Kelurahan Manggar Baru	141	77	17	77	17	77	77	77		
5	Balikkpapan Barat	6471021	6471021001	Kelurahan Baru Ilir	173	72	13	72	13	72	72	72		
6	Balikkpapan Barat	6471021	6471021002	Kelurahan Baru Tengah	94	64	14	64	14	64	64	64		
7	Balikkpapan Barat	6471021	6471021003	Kelurahan Baru Ulu	93	43	6	43	6	43	43	43		
8	Balikkpapan Barat	6471021	6471021004	Kelurahan Kariangau	336	33	7	33	7	33	33	33		
9	Balikkpapan Barat	6471021	6471021005	Kelurahan Margo Mulyo	84	26	11	26	11	26	26	26		
10	Balikkpapan Barat	6471021	6471021006	Kelurahan Marga Sari	207	126	20	126	20	126	126	126		
11	Balikkpapan Utara	6471031	6471031001	Kelurahan Batu Ampar	403	181	46	181	46	181	181	181		
12	Balikkpapan Utara	6471031	6471031002	Kelurahan Gunungamarinda	380	122	37	122	37	122	122	122		
13	Balikkpapan Utara	6471031	6471031003	Kelurahan Karang Joang	344	121	32	121	32	121	121	121		
14	Balikkpapan Utara	6471031	6471031004	Kelurahan Muararakap	265	125	34	125	34	125	125	125		
15	Balikkpapan Utara	6471031	6471031005	Kelurahan Gunungamarinda Baru	258	90	24	90	24	90	90	90		
16	Balikkpapan Utara	6471031	6471031006	Kelurahan Graha Indah	577	112	46	112	46	112	112	112		
17	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041001	Kelurahan Gunung Sari Ulu	229	62	18	62	18	62	62	62		
18	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041002	Kelurahan Gunung Sari Ilir	250	106	9	106	9	106	106	106		
19	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041003	Kelurahan Karang Rejo	429	54	13	54	13	54	54	54		
20	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041004	Kelurahan Karang Jati	78	40	8	40	8	40	40	40		
21	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041005	Kelurahan Mekar Sari	163	40	11	40	11	40	40	40		
22	Balikkpapan Tengah	6471041	6471041006	Kelurahan Sumber Rejo	352	65	29	65	29	65	65	65		
23	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051002	Kelurahan Sepinggan	576	175	41	175	41	175	175	175		
24	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051006	Kelurahan Gunungbahagia	595	111	31	111	31	111	111	111		
25	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051008	Kelurahan Sepinggan Baru	1,048	100	33	100	33	100	100	100		
26	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051009	Kelurahan Sepinggan Raya	218	31	19	31	19	31	31	31		
27	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051010	Kelurahan Sungaiangka	340	55	16	55	16	55	55	55		
28	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051011	Kelurahan Damai Baru	429	71	32	71	32	71	71	71		
29	Balikkpapan Selatan	6471051	6471051012	Kelurahan Damai Bahagia	379	54	36	54	36	54	54	54		
30	Balikkpapan Kota	6471061	6471061001	Kelurahan Prapatan	122	44	9	44	9	44	44	44		
31	Balikkpapan Kota	6471061	6471061002	Kelurahan Telaga Sari	80	33	10	33	10	33	33	33		
32	Balikkpapan Kota	6471061	6471061003	Kelurahan Klandasan Ulu	217	114	27	114	27	114	114	114		
33	Balikkpapan Kota	6471061	6471061004	Kelurahan Klandasan Ilir	418	155	51	155	51	155	155	155		
34	Balikkpapan Kota	6471061	6471061005	Kelurahan Damai	453	95	34	95	34	95	95	95		